

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH (Studi Di Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru)

Nur Hafifah¹, Murakhman Sayuti Enggok², Normajatun³

¹Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, 19120428

²Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, 11 2203 5801

³Ilmu Administrasi Publik, 11 1611 6301

Email: Hafifah1133@gmail.com , msayutienggok@gmail.com, Normajatun63@gmail.com

ABSTRAK

Nur Hafifah. Implementasi Kebijakan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh (Studi Di Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru)

Tujuan penelitian Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh (Studi Di Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif. Sumber data yang digunakan bersifat primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penetapan lokasi permukiman kumuh Kota Banjarbaru sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang terjadi. Seperti indikator sumber daya manusia yang terkombinasi beberapa instansi menyebabkan penanganan tidak mencapai sasaran. Untuk indikator komunikasi yaitu dari sisi transmisi, implementasi kebijakan pemerintah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi serta kejelasan dan konsistensi. Untuk indikator disposisi, para pelaksana kebijakan sudah memiliki komitmen dan memiliki sikap demokratis untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dan untuk indikator struktur birokrasi, kegiatan sosialisasi dan pembuatan sk kebijakan penetapan lokasi permukiman kumuh sudah berpedoman pada SOP yang sudah ada. Terdapat faktor pendukung berupa adanya POKJA dan kolaborasi dengan program KOTAKU.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Permukiman Kumuh

ABSTRACT

Nur Hafifah. *Implementation of Slum Location Determination Policy (Study in Cempaka Village, Banjarbaru City)*

The purpose of the study was to find out how the implementation of the Slum Location Determination Policy (Study in Cempaka Village, Banjarbaru City) at the Banjarbaru City Housing and Settlement Office. The research method used in this study is qualitative research using a descriptive type. The data sources used are primer and secondary. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of the Banjarbaru City Slums settlement location policy has been going well, but in its implementation there are still shortcomings that occur. Such as human resource indicators that are combined from several agencies, making handling not achieve the target. For communication indicators, namely from the transmission side, the implementation of government policies is carried out through socialization activities as well as in terms of clarity and consistency. For disposition indicators, policy implementers already have a commitment and democratic attitude to carry out their duties well. And for indicators of bureaucratic structure, socialization activities and making policy decrees for determining the location of slums are guided by existing SOPs. There are supporting factors in the form of POKJA and collaboration with the KOTAKU program.

Keyword : Implementation, Policy, Slum Location

a. Buku

- Agustino Leo (2022). *Dasar-dasar Kebijakan Public Edisi Revisi Ke-2*. Alfabeta Bandung
- Hayat, H., Malang, U. I., & Pendapatan, P. (2018). *Publik*. Universitas Islam Malang Malang, Indonesia.
- Indiahono, Dwiyanto (2017). *Kebijakan public berbasis dynamic policy analisis*. Gaya media.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*.
- Sugiyono (2020). *Metode Penelitian administrasi dengan metode R&D*. Alfabeta CV Bandung.
- Sugiyono (2022). *Metode penelitian administrasi kualitatif dan kuantitatif*. Alfabetsa CV Bandung.

b. Jurnal

- Azzahra, S. A. (2020). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Sukabumi. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center For Academic Publishing Service.
- Helmi, Muhammad (2022). Wilayah Cempaka Paling Kumuh di Banjarbaru dikutip melalui <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/05/11/2022/wilayah-cempaka-paling-kumuh-di-banjarbaru/> di akses pada 1 April 2023
- Hendi, G. Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Normajatun, N., & Haliq, A. (2020). Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 55-63.
- Novianti, N. (2022). *Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Padang (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)*.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Publisher UNM.
- Pujangga, P. (2022). *Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Tebing Tinggi (Doctoral dissertation)*.
- Robo, T., & Purwati, E. (2022). Mitigasi Pertumbuhan Pemukiman Kumuh Di Kawasan Padat Penduduk. *Jurnal Geocivic*, 5(1).
- Rochman, A. (2019). *Implementasi Program Bedah Rumah Sebagai Upaya Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Malang (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang)*.
- Suwarja, H. M. (2019). *Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan di Kecamatan Medan Marelان*. *Publik Reform*, 5(1).
- Enggok, M. S., & Anhar, D. (2022). Government Policy Of The City Of Banjarmasin On Reducing The Use Of Plastic Bags (A Case Study Of A Government Policy Of The City Of Banjarmasin). *International Journal of Social Science*, 1(5), 601-608.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.

c. Undang-undang

- Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/175/KUM/2022 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Banjarbaru
- Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

